

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tujuan kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai. Meskipun telah berjalan sejak tahun 2018, realisasi kepemilikan KIA belum mencapai target yang diinginkan. Berdasarkan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan merangkum temuan guna menjawab pertanyaan penelitian.

4.1.1. Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang menunjukkan bahwa program ini mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan pendataan kependudukan, memberikan identitas resmi bagi anak, serta mempermudah akses terhadap pelayanan publik. Meskipun telah diterapkan sejak tahun 2018, realisasi kepemilikan KIA masih belum meraih target yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga tahun 2024, persentase kepemilikan KIA masih berada di angka 72,47%, dengan harapan meraih 100% pada tahun 2025.

Dari segi efektivitas, kebijakan ini telah memberikan manfaat dalam mendata anak di bawah usia 17 tahun dan belum menikah, tetapi pemanfaatannya masih belum maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat KIA

selain untuk identitas anak. Beberapa warga masih menganggap KIA hanya sebatas dokumen administrasi tanpa manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam aspek efisiensi, pembuatan KIA tergolong mudah dan gratis, dengan sistem layanan yang terus berinovasi seperti "one service day" dan program jemput bola. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah waktu tunggu yang masih panjang akibat tingginya jumlah pemohon dan keterbatasan jumlah petugas.

Dari segi pemerataan, kebijakan ini telah menjangkau sebagian besar anak di Kota Semarang, dengan cakupan sekitar 80%. Namun, masih terdapat kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil belum sepenuhnya terjangkau. Oleh karena itu, perlu peningkatan strategi agar seluruh anak mempunyai akses yang sama terhadap KIA.

Dalam aspek responsivitas, pelayanan Disdukcapil telah berupaya memberikan layanan yang lebih cepat dan ramah. Namun, tantangan dalam respons terhadap keluhan masyarakat masih ada, terutama terkait kurangnya pemahaman terkait manfaat KIA di luar keperluan administrasi sekolah. Sosialisasi yang dilaksanakan melalui berbagai media, termasuk media sosial, spanduk, dan pendekatan langsung, masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya KIA.

Secara keseluruhan, kebijakan KIA di Kota Semarang telah berlangsung cukup baik dalam hal pendataan dan identifikasi anak sebagai bagian dari administrasi kependudukan. Namun, masih diperlukan berbagai langkah strategis

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat pencapaian target kepemilikan KIA, serta memastikan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Peningkatan sosialisasi, inovasi layanan, serta kerja sama dengan berbagai pihak diharapkan dapat membantu optimalisasi pelaksanaan kebijakan ini di masa mendatang.

4.1.2 Faktor Penghambat dalam Evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program ini. Faktor-faktor tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kendala dalam implementasi kebijakan, serta kurangnya pemahaman dan respons masyarakat terhadap kebijakan ini.

1) Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menjadi hambatan utama dalam pelayanan KIA. Dengan jumlah staf yang terbatas dan beban kerja yang tinggi, proses pengurusan KIA sering mengalami keterlambatan. Minimnya tenaga kerja juga berdampak pada kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dan layanan jemput bola, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dari KIA. Selain itu, keterampilan

teknis dan administratif agen pelaksana masih perlu ditingkatkan agar layanan dapat lebih efisien.

2) Kendala Dalam Implementasi Kebijakan

Proses pelaksanaan kebijakan KIA juga menghadapi berbagai tantangan teknis, seperti gangguan jaringan internet dan keterbatasan infrastruktur. Dalam beberapa kasus, layanan KIA mengalami keterlambatan hingga beberapa hari akibat masalah jaringan atau pemadaman listrik. Meskipun telah tersedia layanan daring, banyak masyarakat masih memilih untuk mengurus KIA secara langsung, sehingga meningkatkan beban kerja petugas pelayanan di loket.

3) Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA masih rendah. Banyak orang tua menganggap KIA sebagai dokumen tambahan yang tidak mempunyai manfaat nyata, sehingga mereka enggan mengurusnya. Minimnya sosialisasi yang berkelanjutan juga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran KIA dalam administrasi kependudukan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum bagi anak-anak.

4) Kolaborasi Antar Instansi yang Belum Optimal

Upaya meningkatkan pemanfaatan KIA melalui kerja sama dengan berbagai mitra masih menghadapi kendala. Sebagian mitra belum secara aktif menginformasikan manfaat KIA kepada masyarakat, sehingga banyak orang tua

yang belum mengetahui fasilitas atau insentif yang bisa diperoleh dengan KIA. Selain itu, terdapat hambatan dalam menjalin kerja sama baru dengan berbagai pihak, termasuk tempat wisata dan pusat layanan publik lainnya.

Secara keseluruhan, keberhasilan keberjalanan kebijakan KIA di Kota Semarang masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Diperlukannya peningkatan jumlah serta kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sistem pelayanan berbasis teknologi, serta strategi sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat, diharapkan cakupan kepemilikan KIA dapat meningkat, serta manfaat kebijakan ini dapat dirasakan secara lebih luas.

5) Pemahaman Stakeholder terhadap Tujuan Kebijakan KIA

Pemahaman stakeholder terhadap kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang masih menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realisasi. Meskipun tujuan utama kebijakan dalam meningkatkan kepemilikan identitas anak telah tercapai dengan baik, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kewajiban kepemilikan KIA. Beberapa masyarakat menganggap bahwa KIA belum mempunyai perbedaan signifikan dibandingkan dengan dokumen kependudukan lain misalnya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Oleh karenanya, diperlukan sosialisasi lebih intensif dan perluasan fungsi KIA agar manfaatnya lebih nyata dalam berbagai sektor layanan publik.

Beberapa informan menyatakan bahwa KIA telah membantu dalam administrasi kependudukan serta mendukung hak anak dalam memperoleh layanan dasar. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, terutama dari sisi pemanfaatan yang belum optimal. Masyarakat menilai bahwa tujuan dan manfaat KIA belum sepenuhnya jelas, serta penggunaannya dalam berbagai layanan masih terbatas. Kurangnya sosialisasi dan belum luasnya penerapan KIA dalam layanan publik menyebabkan banyak orang tua yang enggan mengurusnya. Oleh karena itu, edukasi yang lebih luas dan peningkatan fungsi KIA dalam berbagai sektor diperlukan agar kebijakan ini dapat lebih efektif.

6) Biaya dalam Pelaksanaan Kebijakan KIA

Pelaksanaan kebijakan KIA di Kota Semarang sebagian besar didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dialokasikan untuk pencetakan kartu, sosialisasi kebijakan, serta pengelolaan sistem administrasi kependudukan. Meskipun anggaran yang tersedia dinilai cukup untuk mencetak kartu bagi anak-anak yang mengajukan permohonan, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi yang optimal dan terbatasnya distribusi kartu, terutama bagi warga di wilayah yang jauh dari pusat kota. Program jemput bola dinilai sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan KIA, tetapi keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran serta optimalisasi strategi sosialisasi dan distribusi agar kebijakan KIA dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, terdiri beberapa rekomendasi dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini:

1. Penyusunan Regulasi yang Lebih Kuat

- a) Pemerintah Pusat dan daerah dapat mengusulkan peraturan atau surat edaran yang mewajibkan kepemilikan KIA sebagai syarat untuk mengakses layanan publik tertentu, seperti pendaftaran sekolah, layanan kesehatan, atau pembuatan rekening bank anak.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

- a) Pemerintah daerah perlu menambah jumlah pegawai di Disdukcapil Kota Semarang guna mengurangi beban kerja yang berlebihan serta mempercepat proses pelayanan KIA.
- b) Pelatihan dan peningkatan keterampilan teknis serta administratif bagi agen pelaksana harus dilaksanakan secara berkala agar mereka lebih kompeten dalam menangani layanan kependudukan.
- c) Optimalisasi peran tenaga magang atau pekerja kontrak dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif sehingga mereka dapat lebih berkontribusi dalam proses pelayanan.

3. Optimalisasi Implementasi Kebijakan

- a) Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk memastikan jaringan internet yang stabil serta menyediakan sistem

cadangan saat terjadi pemadaman listrik, agar pelayanan KIA tetap berjalan lancar.

- b) Penggunaan layanan digital perlu diperluas dan disosialisasikan secara lebih intensif agar masyarakat lebih terbiasa dan terdorong untuk mengurus KIA secara daring, sehingga mengurangi antrean di loket pelayanan.

4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

- a) Sosialisasi yang lebih masif harus dilaksanakan melalui berbagai media, termasuk media sosial, radio, televisi lokal, serta kampanye langsung di sekolah dan lingkungan masyarakat.
- b) Penyuluhan kepada orang tua mengenai manfaat praktis KIA, seperti kemudahan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, harus lebih ditekankan agar tingkat kepemilikan KIA meningkat.

5. Memperkuat Kolaborasi Antar Instansi

- a) Kerja sama dengan sekolah, rumah sakit, dan instansi lain harus diperkuat agar pembuatan KIA dapat dilaksanakan secara lebih efektif melalui layanan terintegrasi, seperti paket 3 in 1 (akta kelahiran, kartu keluarga, dan KIA).
- b) Pemerintah perlu memperluas kerja sama dengan sektor swasta, seperti pusat perbelanjaan, taman rekreasi, dan fasilitas umum lainnya, untuk memberikan insentif bagi pemilik KIA sehingga lebih banyak masyarakat terdorong untuk mengurusnya.

6. Pengembangan Layanan Inovatif

- a) Penerapan sistem antrean online dan layanan pengiriman KIA ke rumah dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan di loket pelayanan.
- b) Pembuatan aplikasi layanan kependudukan yang lebih interaktif dan user-friendly akan membantu masyarakat dalam mengurus dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil.

7. Peningkatan Anggaran dan Efektivitas Distribusi KIA

- a) Meskipun anggaran saat ini cukup untuk pencetakan kartu, ada kendala dalam distribusi, khususnya untuk wargs yang tinggal di wilayah terpencil.
- b) Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan anggaran untuk mendukung program jemput bola guna memastikan seluruh anak mempunyai akses yang mudah dalam pengurusan KIA.
- c) Kerja sama dengan sekolah dan fasilitas kesehatan dapat membantu mendistribusikan KIA secara lebih merata.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat berjalan lebih optimal, target kepemilikan KIA dapat tercapai, serta manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas.